

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- N.M. Spelt dan J.M.J.M. ten berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

Ridwan H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Siti Khotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV MFA, Bantul.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Kbm Indonesia, Jogjakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 352/Kep/Bpp/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Jurnal

R. Maulana, & J. Jamhir, 2019, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol 3.

M. I. F. Assegaf, H. Juliani, & N. Sa'adah, 2019, “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal* Vol 8.

Wilda Samsi, Waluyo, & Rahayu Subekti, 2022, “Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)* Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret* Vol. 2, No. 3.

Winda Fitri & Sheerleen, 2021, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7, No. 2.

M. Syafiq, 2019, “Birokrasi Di Era Revolusi Industri 4.0:(Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)”, *Journal Of Social Politics And Governance* Vol 1.

T. T. P. Asmara, I. Ikhwansyah, & A. Afriana, 2019, Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal* Vol 4.

Syahrul Ibad, 2021, “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”, *HUKMY Jurnal Hukum* Vol 1, No. 1.

Teguh Prasetyo & Maharani Nurdin, 2021, “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2.

Fery Dona, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.1 (2019).

Asrulla, M.Syahrani Jailani, & Firdaus Jeka, “Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 7, no. 3, (2023).

Hamdi Nur & Roni Haryadi, “Identifikasi Lokasi Tambak Udang Di Kabupaten Padang Pariaman”, *Jurnal Geografi* Vol.1 No. 2, (2022).

Website

<https://sumatra.bisnis.com/read/20221011/534/1586446/tambak-udang-vaname->

[di-sumbar-tumbuh-pesat-pemda-atu-kawasan-usaha-melalui-rtrw](https://sumatra.bisnis.com/read/20221011/534/1586446/tambak-udang-vaname-di-sumbar-tumbuh-pesat-pemda-atu-kawasan-usaha-melalui-rtrw)

http://perizinan.padangpariamankab.go.id/berita/berita_detail/36